

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
CIREBON DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TAHUN 2004-2005**

**IMPLEMENTATION POLICY OF GOVERNMENT OF TOWN OF
CIREBON IN SETTLEMENT OF MERCHANT OF CLOISTER
YEAR 2004-2005**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**ANANDITO PRIYANTO
20010520221**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
CIREBON DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
TAHUN 2004-2005**

**IMPLEMENTATION POLICY OF GOVERNMENT OF TOWN OF
CIREBON IN SETTLEMENT OF MERCHANT OF CLOISTER
YEAR 2004-2005**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Pesyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta



Disusun Oleh:

ANANDITO PRIYANTO
20010520221

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan dan disahkan di depan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2005

Tempat : Ruang Sidang IP

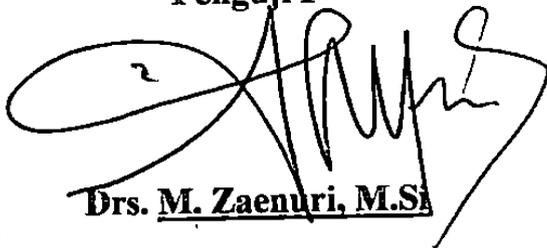
SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua



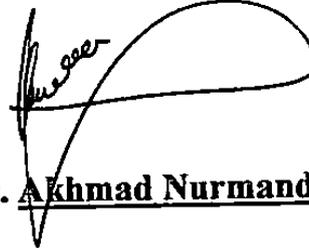
Titin Purwaningsih, SIP. M.Si

Penguji I



Drs. M. Zaenuri, M.Si

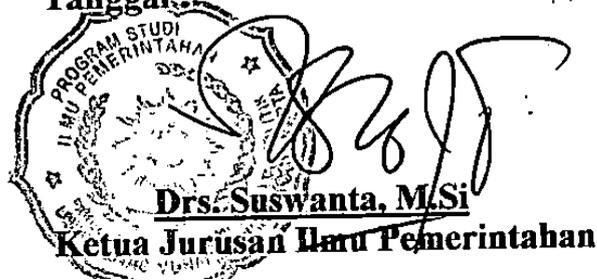
Penguji II



Drs. Akhmad Nurmandi, M.Sc

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)

Tanggal:



Drs. Suswanta, M.Si
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi dimanapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila ada di kemudian hari terbukti terdapat duplikat dan ada pihak lain yang merasa dirugikan, maka saya akan bertanggungjawab dan menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yang membuat pernyataan



Anandito Priyanto

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak. Bambang Eka CW. S.IP. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Titin Purwaningsih, SIP. M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah kesibukan yang padat untuk memberikan bimbingan demi selesainya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Suswanta M.Si, Selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. Sabar Simamora, selaku Kepala Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Staf yang telah dengan sabar membantu memberikan data, informasi dan saran yang penulis butuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
SINOPSIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Dasar Teori	5
E. Definisi Konseptual	26
F. Definisi Operasional	27
G. Metodologi Penelitian	28
BAB II DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kota Cirebon	34
1. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	34
2. Kependudukan	38
3. Bidang Perekonomian	40

B. Profil Pemerintah Kota Cirebon	41
1. Sejarah Kota Cirebon	41
2. Visi, Misi dan Kebijakan Kota Cirebon	42
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Cirebon.....	46
D. Sektor Informal di Kota Cirebon	68

BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA

CIREBON DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

A. Kebijakan Program Penataan PKL.....	72
B. Implementasi Kebijakan Program Penataan PKL.....	79
1. Aspek Sumber Daya/Kemampuan aparat yang Melaksanakan Kebijakan	92
2. Aspek Sumber Dana	93
3. Aspek Sumber Daya yang Lain	94
C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	95
1. Kemampuan Aparat.....	95
2. Anggaran Biaya.....	96
3. Peralatan Administratif	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
---------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kondisi Penggunaan Lahan Kota Cirebon Tahun 2000	36
Tabel 2.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Cirebon.....	40
Tabel 2.3. Tabel Golongan dan Jumlah Pegawai Kantor Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	68
Tabel 2.4. Jenis Dagangan PKL Kota Cirebon	69
Tabel 2.5 Jumlah Pedagang Kaki Lima Menurut Jenis Dagangan dan Asal Daerah di Kota Cirebon Tahun 2004.....	69
Tabel 3.1 Rencana Kebijakan Program Penataan PKL Bina Wilayah di Kota Cirebon Tahun 2004.....	78
Tabel 3.2 Implementasi Kebijakan Program Penataan PKL di Kota Cirebon Tahun 2004.....	81
Tabel 3.3. Kelompok Jenis Dagangan.....	89

SINOPSIS

Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur dan mengganggu aktivitas masyarakat dan melanggar Perda tentang ketertiban umum, maka Pemerintah Kota Cirebon melakukan penataan dan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima, sehingga para PKL melakukan unjuk rasa di Balai Kota Cirebon. Penataan terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap status keberadaan pedagang yang kebanyakan adalah warga migran yang datang dari luar wilayah Kota Cirebon. Pelaksanaan program penataan ini menuntut peran serta dari aparat pemerintah. Keberhasilan penataan pedagang kaki lima ini selain adanya kesadaran pedagang kaki lima untuk melaksanakannya juga tergantung pada kemampuan aparat pemerintah dalam pelaksanaan penataan tersebut. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul tentang **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2004-2005”** Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2004-2005.

Untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan secara obyektif perumusan masalah di atas, penulis menggunakan metode penelitian diskriptif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2004-2005 dilakukan dengan penertiban yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja didasarkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Implementasi penataan dilakukan dengan penyuluhan tentang program penataan yaitu tentang ijin lokasi, waktu, dasaran, kebersihan. Dalam penataan PKL Pemerintah Kota Cirebon telah menyediakan 6 titik lokasi yang disediakan untuk para PKL. PKL ditertibkan karena tidak mempunyai ijin lokasi, penertiban dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara lisan dan tidak tertulis. Faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan adalah kemampuan aparat, keterbatasan anggaran biaya dan peralatan administratif guna mendukung implementasi kebijakan. Faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi kebijakan adalah kemampuan aparat dalam hal ini adalah Polisi Pamong Praja. Penataan dilakukan dengan penyuluhan tentang program penataan yaitu tentang ijin lokasi, waktu, dasaran, kebersihan. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah aspek sumber

Aparat yang melakukan adalah aparat dari Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Sehingga berdasarkan hasil penelitian perlu dikaji secara lebih mendalam tentang peraturan dan konsep yang jelas dan sah secara hukum untuk menertibkan dan menata PKL. Peraturan Daerah sangat dibutuhkan untuk hal-hal yang sangat penting, seperti untuk pengaturan PKL, sehingga perlunya segera membuat Peraturan Daerah khusus yang mengatur keberadaan PKL di Kota Cirebon